**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Penelitian**

 Arus globalisasi semakin menyebar ke seluruh penjuru dunia secara cepat dan meluas, tak terbatas pada negara-negara maju tetapi juga melintasi negara-negara miskin atau pun negara-negara berkembang.[[1]](#footnote-2) Kemajuan teknologi yang kian pesat termasuk salah satu faktor pendukung terjadinya globalisasi. Sehingga dengan berkurangnya batasan-batasan tersebut menyebabkan menurunnya tingkat keamanan karena berkurangnya privasi. Keamanan merupakan hal yang krusial bagi keutuhan suatu negara. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah ancaman perang semakin kompleks. Kemajuan teknologi yang memberi dampak negatif tersebut bukanlah satu-satunya faktor yang menyebabkan ketegangan di dunia internasional. Banyak hal lain seperti kesenjangan sosial dan kemiskinan bagi negara-negara yang masih berkembang, perbedaan ideologi dari berbagai macam suku bangsa, bahkan radikalisme agama yang berujung pada konflik serta negara-negara non demokrasi yang bangsanya selalu diwarnai dinamika konflik.

 Pada dekade 2000-an, ancaman nasional semakin meningkat. Kejahatan yang begitu variatif terdapat di Indonesia. Salah satunya yang terkait pada meningkatnya ancaman global ialah terorisme. Terorisme merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengambil banyak perhatian masyarakat dunia. Kejahatan yang berdasar dari sebuah jaringan ini telah banyak melebarkan sayapnya di dunia. Hal tersebut benar-benar menjadi isu penting dunia yang hingga kini masih sulit diminimalisir, karena jaringannya yang terus meluas. Oleh sebab itu kejahatan semacam ini membutuhkan proses penanganan yang cukup lama dan rumit agar dapat terselesaikan. Terorisme dianggap sebagai kejahatan kemanusiaan, karena mereka (teroris) yang melakukan aktivitas terorisme, biasanya tidak peduli dengan sasaran atau targetnya, melainkan yang terpenting adalah tujuannya untuk menyampaikan pesan yang mereka maksud, yang dilakukan melalui tindakan terorisme tersebut. Karena tindakan terorisme selalu memiliki tujuan yang bersifat ‘berontak’ dan ‘memaksa’ entah ditujukan untuk pemerintah, institusi, suku bangsa, atau bahkan dunia interasional.[[2]](#footnote-3)

 Kejahatan terorisme sangatlah krusial karena mencakup segala lini, dapat menimbulkan konflik internasional serta menciptakan ketegangan dalam ruang lingkup kerjasama internasional. Sehingga akibat dari peristiwa-peristiwa terkait terorisme tersebut akan memberikan dampak yang besar dan akan berpengaruh pula pada salah satunya, seperti stabilitas perekonomian dan perdagangan dunia. Karena aksi terorisme akan menimbulkan kerugian besar; misalnya kepanikan massa yang kian melonjak; hubungan diplomasi atau politik luar negeri negara-negara yang terkena aksi terorisme biasanya akan mendapatkan sedikitnya dampak berupa kesulitan dalam perihal kerjasama, karena hilangnya kepercayaan negara lain terhadap kondisi keamanan dan pertahanan negara-negara tersebut.

 Keamanan merupakan istilah yang secara sederhana dapat dimengerti sebagai suasana “bebas dari segala bentuk ancaman bahaya, kecemasan, dan ketakutan”.[[3]](#footnote-4) Dengan begitu dapat dikatakan bahwa melihat dari berbagai fenomena konflik yang terjadi di Indonesia, khususnya masalah terorisme, kondisikeamanan negara di Indonesia masih lemah. Karena masih terdapat begitu banyak bentuk ancaman, baik dari segi kejahatan berskala ringan maupun besar seperti terorisme. Sejumlah peristiwa terorisme menunjukkan adanya mata rantai antara kelompok dalam dan luar negeri. Dari hasil pengungkapan berbagai kasus dan peristiwa aksi terorisme di Indonesia, diketahui semua itu merupakan produk kejahatan yang terkait dengan jaringan teroris internasional dimana keberadaannya berikut segala aktifitasnya tidak dapat terdeteksi secara dini sehingga sulit untuk dicegah dan ditangkal.[[4]](#footnote-5)

Kemungkinan-kemungkinan munculnya aktifitas terorisme ini tentunya didasari oleh pemahaman atau ideologi tertentu yang bertolakbelakang dengan mayoritas. Perbedaan tersebut dapat memicu aksi terorisme karena pada dasarnya, pelaku terorisme (teroris) selalu bertujuan setidaknya terkait dengan aspek politik. Seperti halnya ketidakberpihakan kepada pemerintah atau suatu suku bangsa (konflik etnik), dapat memicu lahirnya terorisme. Hal tersebut berawal dari pemahaman yang radikal dan tak terkendali. Pembiaran terhadap praktik-praktik intoleransi dan radikalisme, sesungguhnya berpotensi mengancam stabilitas keamanan dan integritas sebuah bangsa, karena intoleransi dan radikalisme merupakan tempat bersemai pikiran-pikiran dan aksi yang berpotensi menuju terorisme.[[5]](#footnote-6)

Dalam rangka menghadapi berbagai kasus terorisme di Indonesia, sudah banyak upaya yang dilaksanakan pemerintah, misalnya melalui pencegahan dan penindakan. Namun kendala yang dialami yaitu karena aksi terorisme ini merupakan gerakan dalam bentuk jaringan kelompok, membuat usaha pencegahan dan penindakan memerlukan waktu yang cukup lama. Tidak berbeda halnya dengan partai politik, para pelaku dan pionir terorisme di Indonesia ini telah melakukan kaderisasi agar jaringan kelompoknya semakin luas. Lebih mendasar lagi, jaringan tersebut merupakan pengaruh dari jaringan-jaringan yang sudah ada dan berlokasi di luar negara Indonesia. Misalnya organisasi Al Qaeda, ISIS dan semacamnya. Melihat fenomena yang demikian mendorong kepada kesimpulan bahwa berbagai pergolakkan yang terjadi di berbagai penjuru dunia seperti perjuangan melawan penjajah, pergolakan rasial, konflik regional yang ternyata melibatkan campur tangan pihak ketiga, seperti negara-negara adidaya atau negara-negara maju dengan berbagai kepentingannya.

Ketidakstabilan dunia dan rasa frustrasi dari banyak negara berkembang dalam perjuangan menuntut hak-hak yang dianggap fundamental dan sah, membuka peluang muncul dan meluasnya terorisme. Serangan terorisme itu tidak pernah bisa diduga karena sasarannya sama dengan luasnya seluruh permukaan bumi. Dari beberapa peristiwa yang pernah terjadi, kasus terorisme ini mengatasnamakan “perjuangan” suatu agama tertentu (Islam) sehingga memicu ketegangan yang semakin tinggi di dunia. Banyak spekulasi yang muncul, seperti timbulnya anggapan negatif akan agama tertentu, serta asumsi akan provokasi adu domba antar bangsa yang dibentuk melalui serangan terorisme atas nama agama tertentu. Hal ini semakin genting dalam dunia internasional dan merusak stabilitas segala aspek kehidupan. Meskipun begitu familiarnya konsep diplomasi internasional dewasa ini, ternyata masih tetap sulit untuk menyelesaikan perkara terorisme tersebut. Karena masalah terorisme melibatkan banyak suku bangsa dan negara, sehingga terorisme ini dianggap sebagai bentuk kejahatan global dalam skala besar. Setiap negara memiliki karakter sistem pertahanan dan keamanan yang berbeda-beda. Ketahanan Nasional merupakan suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang terdiri atas ketangguhan serta keuletan dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun luar, secara langsung maupun tidak langsung, yang mengancam dan membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan dalam mewujudkan tujuan perjuangan nasional.

Pencegahan dan penanggulangan terorisme membutuhkan suatu kerjasama secara menyeluruh dari berbagai elemen bangsa. Maka terkait dengan hal tersebut Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) memiliki peranan sebagai Alat Pertahanan Negara, seperti yang tertera dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR) Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Bab I Pasal 2 dan Bab II Pasal 6[[6]](#footnote-7). Maka dalam upaya pemberantasan terorisme, TNI dan POLRI perlu berkoordinasi dengan baik meskipun mereka memiliki peranan masing-masing dalam penanggulangan terorisme tersebut. Oleh sebab itu, menurut penulis topik terorisme ini sangatlah penting dan genting untuk dibahas dan diteliti. Beberapa tahun terakhir, isu terorisme ini semakin marak diperbincangkan karena tak kunjung redup dan selalu timbul peristiwa-peristiwa terorisme baru. Maka dari itu, Penulis memilih judul “**Peranan TNI/POLRI dalam Menanggulangi Jaringan Terorisme Internasional di Indonesia**”.

**B. Identifikasi Masalah**

 Berdasarkan latar belakang penelitian, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan TNI/POLRI dalam memerangi terorisme?
2. Bagaimana kondisi jaringan terorisme internasional di Indonesia?
3. Bagaimana hasil yang dicapai oleh TNI/POLRI dalam penanggulangan terorisme di Indonesia?

**1. Pembatasan Masalah**

 Agar tidak keluar dari permasalahan, penulis membatasi masalah pada tindakan TNI/POLRI dalam penanggulangan jaringan terorisme internasional di Indonesia.

**2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah, untuk mempermudah kajian permasalahan, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

*“Bagaimana peranan TNI/POLRI dalam menanggulangi masalah terorisme di Indonesia melalui pencegahan dan penindakan?”*

**C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

**1.Tujuan Penelitian**

 Tujuan penelitian berkaitan dengan penelaahan, pemahaman, serta pengembangan bidang yang diteliti. Adapun tujuan dilaksanakan penelitian dalam studi Hubungan Internasional adalah seperti berikut:

1. Untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan oleh TNI/POLRI dalam memerangi terorisme.
2. Untuk mengetahui kondisi jaringan terorisme internasional di Indonesia.
3. Untuk mengetahui hasil yang dicapai oleh TNI/POLRI dalam menanggulangi terorisme di Indonesia.

**2. Kegunaan Penelitian**

 Kegunaan dibuatnya penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengembangkan ilmu Hubungan Internasional melalui penerapan teori-teori dalam studi Hubungan Internasional khususnya yang terkait dengan masalah terorisme serta peranan TNI/POLRI dalam penanggulangannya.
2. Untuk melatih penulis agar dapat berpikir kritis, analitis dan logis. Serta menambah ilmu bagi penulis dan sebagai informasi yang berguna bagi mahasiswa ataupun pihak lain yang berkepentingan.
3. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh Ujian Sarjana Strata Satu (S1) jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung.

**D. Kerangka Teoritis dan Hipotesis**

**1. Kerangka Teoritis**

 Supaya dapat dengan mudah dipahami, maka penyusunan skripsi ini perlu dilandasi dengan teori-teori yang relevan dengan topik permasalahan yang sudah ditentukan. Dengan begitu maka pokok permasalahan yang akan dibahas dapat dengan mudah dipahami melalui penjabaran teori-teori yang mendasar. Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan model yang dikembangkan oleh Mazhab Baden yang bersinergi dengan aliran filsafat fenomenologi yang menghendaki pelaksanaan penelitian berdasarkan pada situasi wajar (*natural setting*) sehingga sering disebut sebagai *metode naturalistik*.[[7]](#footnote-8)

 Menurut Tulus Warsito, Hubungan Internasional adalah studi mengenai hubungan atau interaksi antar anggota masyarakat antar negara atau bangsa, baik yang govermental maupun non govermental. [[8]](#footnote-9) Sedangkan menurut J. C. Johari, Hubungan internasional merupakan sebuah studi tentang interaksi yang berlangsung diantara negara-negara berdaulat disamping itu juga studi tentang pelaku-pelaku non negara (*non states actors*) yang perilakunya memiliki dampak terhadap tugas-tugas Negara.[[9]](#footnote-10)

Gambaran dunia Hubungan Internasional di masa lalu dapat dipahami melalui pandangan Realis dalam paradigma Hubungan Internasional. Dimana politik dunia terdiri dari anarki internasional negara-negara berdaulat. Anarki merupakan kekacauan dalam negeri yang ditimbulkan jika karena tidak ada pemerintahan, undang-undang, peraturan atau pun ketertiban.[[10]](#footnote-11) Realisme memiliki pandangan yang pesimis terhadap sifat manusia, sehingga berasumsi bahwa Hubungan Internasional hanya terbatas kepada tataran “*High Politics*” atau permasalahan diplomatik, militer dan strategis, dengan negara sebagai satu-satunya aktor yang penting pada tatanan hubungan internasional atau di tengah interaksi politik secara internasional, dan menekankan pada konsep-konsep atau permasalahan perang dan damai, konflik dan kerjasama.

Pada era dunia yang kontemporer ini, Hubungan Internasional tidaklah terfokus kepada negara sebagai aktor tunggal. Karena Hubungan Internasional tidak menyangkut perihal negara saja, melainkan banyak hal-hal lain seperti *non-state* yang dapat menjadi aktor dalam Hubungan Internasional. Seperti paradigma Pluralisme menurut Ilmu Hubungan Internasional yang menyatakan bahwa aktor-aktor dalam Hubungan Internasional bukan hanya negara saja, tetapi juga aktor non-negara dan termasuk di dalamnya *societal* (masyarakat).[[11]](#footnote-12)

Dalam buku *Isu-isu Global Kontemporer* karya Budi Winarno, dijelaskan bahwa isu-isu global kontemporer mencakup Ekonomi dan Perdagangan; Kemiskinan dan Kesenjangan Global; Pembangunan Internasional; Kerjasama Kawasan; Globalisasi dan Isu Demokrasi; Energi, Lingkungan Hidup, dan Pemanasan Global; Terorisme dan Keamanan Internasional; Krisis Pangan Dunia; Hak Asasi Manusia (HAM); Nasionalisme dan Konflik Etnik; Proliferasi Senjata Nuklir; *Global Governance* dan Tata Kelola Dunia Internasional; Korupsi dan *The Captured State*; serta Kejahatan Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*). Maka dapat disimpulkan bahwa dunia Hubungan Internasional memiliki tataran “*Low Politics*” atau cakupan yang sangat luas, dengan begitu kemungkinan-kemungkinan pemicu konflik pun sama luasnya.

Konflik adalah sebuah ekspresi heterogenitas kepentingan, nilai serta keyakinan yang muncul sebagai formasi baru yang ditimbulkan oleh perubahan sosial yang kemudian bertentangan dengan hambatan yang diwariskan.[[12]](#footnote-13) Munculnya konflik dalam suatu negara membutuhkan resolusi yang sesuai dengan kondisi pertahanan negara tersebut. Konflik dapat berupa apa saja, baik yang bersumber internal maupun eksternal. Dengan adanya eksistensi *low politics* pada hubungan internasional, menyebabkan banyaknya kemungkinan yang dapat menjadi penyebab konflik. Karena begitu banyak peranan penting yang terlibat di dunia Hubungan Internasional.

Globalisasi telah menciptakan ruang dimana negara tidak lagi menjadi aktor tunggal. *Low Politics*, sebagai bentuk nyata dari adanya globalisasi. Dengan adanya globalisasi, segala kemungkinan akan timbulnya aksi terorisme pun semakin luas cakupannya. Seperti yang didefinisikan oleh Held dalam Jurnal Ilmiah karya Budi Winarno, globalisasi dapat dipahami sebagai perubahan-perubahan dalam bidang ekonomi dan sosial yang berkombinasi dengan pembentukan kesalinghubungan regional dan global yang unik, yang lebih ekstensif dan intensif dibandingkan dengan periode sebelumnya, yang menantang dan membentuk kembali komunitas politik secara spesifik dalam negara modern.[[13]](#footnote-14) Fenomena globalisasi tersebut telah mengantarkan kemudahan bagi para pelaku terorisme menyebarluaskan ideologi, doktrin berikut jaringannya. Penyebarluasan tersebut dapat terjadi karena adanya keterkaitan antar negara.

Negara adalah alat (*agency*) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan berbagai gejala kekuasaan dalam masyarakat.[[14]](#footnote-15) Dengan kepentingannya masing-masing, negara-negara terus terlibat satu sama lain dalam upaya memenuhi kepentingan nasionalnya masing-masing. Saling ketergantungan antar negara demi memenuhi kepentingannya masing-masing dapat disebut sebagai interdependensi. Interdependensi secara harfiah merupakan perwujudan manusia (negara) sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan dari manusia lain.[[15]](#footnote-16) Saling ketergantungan tersebut merupakan salah satu bentuk globalisasi yang membuat dunia semakin menipis batasannya.

Dengan menipisnya batasan-batasan dunia, tidak sedikit pula pihak yang menyalahgunakan fenomena ini. Berdasarkan pada kepentingan politik, selalu ada oknum yang menyalahgunakan kelebihan dari adanya dunia hubungan internasional. Salah satunya adalah penyebaran jaringan terorisme. Dengan adanya interdependensi antar negara serta globalisasi, hal tersebut jadi mempermudah mereka (teroris) mengakses berbagai negara dalam rangka upaya penyebarluasan jaringannya.

Aksi terorisme di dunia merupakan salah satu bentuk konflik kejahatan dalam skala global atau besar. Menurut buku Kamus Politik, B. N. Marbun mendefinisikan bahwa,

“teror merupakan suatu usaha menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan. Kemudian definisi teroris ialah orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut, biasanya untuk tujuan politik. Sedangkan terorisme merupakan praktek-praktek tindakan teror. Tujuannya untuk mempromosikan kepentingan politiknya, sehingga dunia internasional tahu apa yang mereka perjuangkan.”

Menurut penjelasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dinyatakan bahwa,

“terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara, karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.”[[16]](#footnote-17)

Terorisme sebagai ancaman global merupakan salah satu cakupan isu global kontemporer. Untuk menghadapi jaringan terorisme internasional yang semakin meradang di dunia, setiap negara pun tentunya memiliki kebijakan yang terkait dengan upaya pemberantasan terorisme, salah satunya Indonesia. Setiap negara memiliki karakteristik masing-masing. Misalnya perihal keamanan nasional. Keamanan nasional pada hakekatnya merupakan kebutuhan mendasar bagi semua negara, apapun itu bentuk negaranya dan bagaimanapun sistem pemerintahannya. Pada dewasa ini, konsep keamanan disamping menyangkut aspek pertahanan atau kekuatan militer, juga berkaitan dengan tiga hal penting, yaitu: (1) *isu-isu global kontemporer*; (2) *berkaitan dan melibatkan aktor-aktor baru selain militer sebagai aktor tradisional*; dan (3) *mengenai persepsi ancaman*.[[17]](#footnote-18)

Upaya pemerintah untuk mempertahankan keamanan nasional ialah antara lain dengan dibentuknya aparat seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). TNI dan POLRI merupakan organisasi resmi yang dibentuk oleh pemerintah untuk kepentingan Pertahanan dan Keamanan Nasional. Menurut Dahlan Al Barry, organisasi merupakan pengaturan dan penyusunan bagian-bagian tertentu hingga menjadi satu kesatuan, aturan dan susunan dari berbagai bagian sehingga menjadi satu kesatuan yang teratur dan gabungan kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.[[18]](#footnote-19) Keberadaan suatu organisasi, dapat dikaji dengan adanya teori yang terkait seperti Teori Institusional atau Teori Kelembagaan. Kelembagaan atau Institusional adalah keseluruhan pola-pola ideal, organisasi, dan aktivitas yang berpusat di sekeliling kebutuhan dasar seperti kehidupan keluarga, negara, agama dan mendpatkan makanan, pakaian, dan kenikmatan serta tempat perlindungan.[[19]](#footnote-20)

Sebelum militer Indonesia menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) oleh pemerintah Republik Indonesia (RI), tahun 1943 diberi nama “Poesat Tenaga Rakyat” atau Poetra, kemudian pada September 1943 Poetra membentuk Tentara Pembela Tanah Air (PETA). Kemudian tanggal 5 Oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), dan untuk memperbaiki susunan yang sesuai dengan dasar militer internasional, diubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) kemudian pada akhirnya diganti lagi menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada tanggal 3 Juni 1947.[[20]](#footnote-21) Sedangkan kemandirian POLRI diawali sejak terpisahnya dari ABRI tanggal 1 April 1999 sebagai bagian dari proses reformasi dan hal tersebut bukanlah untuk menjadikan institusi yang tertutup dan berjalan serta bekerja sendiri, namun tetap dalam kerangka ketatanegaraan dan pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.[[21]](#footnote-22)

**2. Hipotesis Penelitian**

 Berdasarkan kerangka teoritis serta perumusan masalah yang sudah tertera sebelumnya, maka penulis mengemukakan hipotesis seperti berikut : **“Jika langkah-langkah TNI/POLRI dalam menanggulangi jaringan terorisme di Indonesia melalui pencegahan yang meliputi sosialisasi atau kampanye anti terorisme dan penindakan yang berupa penangkapan serta penetapan hukuman sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku, maka akan meminimalisir aktifitas terorisme yang ditandai dengan berkurangnya jaringan terorisme serta tertangkapnya para pelaku terorisme.”**

**3. Operasionalisasi Variabel dan Indikator (Konsep Teoritik, Empirik, dan Analisis)**

**Tabel 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel dalam Hipotesis****(Teoritik)** | **Indikator****(Empirik)** | **Verifikasi****(Analisis)** |
| Variabel Bebas:Jika Peranan TNI/POLRI dalam menanggulangi terorisme melalui penindakan dan pencegahan | 1. Penanggulangan terorisme melalui pencegahan oleh TNI/POLRI yang meliputi sosialisasi atau kampanye anti terorisme 2. Penanggulangan terorisme melalui upaya penindakan oleh TNI/POLRI yang meliputi penangkapan dan penentuan hukuman sesuai undang-undang yang berlaku | 1. Data (*fakta dan angka*) mengenai adanya aktifitas TNI/POLRI dalam menanggulangi terorisme meliputi sosialisasi atau kampanye anti terorisme2. Data (*fakta dan angka*) mengenai penangkapan pelaku terorisme serta penentuan hukuman sesuai undang-undang yang berlaku |
| Variabel Terikat:maka akan meminimalisir aktifitas terorisme di Indonesia | 3. Berkurangnya aktifitas terorisme dan jaringan terorisme di Indonesia4. Tertangkapnya para pelaku terorisme di Indonesia | 3. Data (*fakta dan angka*) mengenai jumlah aktifitas terorisme dan jaringan terorisme di Indonesia4. Data (*fakta dan angka*) mengenai jumlah pelaku terorisme yang tertangkap |

**4. Skema Kerangka Teoritik**

**Gambar 1**

**Skema Kerangka Teoritik**

Terorisme Internasional

Republik Indonesia

Gerakan Terorisme di Indonesia:

DI/TII atau NII

Jamaah Islamiyah

Komando Jihad

Laskar Jihad

Jamaah Ansharut Tauhid

POLRI:

* Intelkam
* Densus 88

TNI:

* Sat Gultor 81

KOPASSUS – TNI AD

* Den Jaka (Detasemen Jalamangkara) – TNI AL
* Den Bravo (Detasemen Bravo) 91 – TNI AU

Badan Intelijen Strategis – BAIS/BIA

Badan Intelijen Negara (BIN)

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

Menurunnya aktifitas terorisme di Indonesia karena upaya TNI/POLRI dengan cara pencegahan dan penindakan sehingga terciptanya peningkatan ketahanan dan keamanan nasional.

**E. Metode dan Teknik Pengumpulan Data**

**1. Tingkat Analisis**

Penggunaan tingkat analisa dalam studi Hubungan Internasional penting dilakukan untuk memilah-milah masalah yang paling layak ditekankan atau dianalisis, serta untuk menghindari kemungkinan melakukan kesalahan metodologis. Oleh sebab itu penulis akan menjelaskan tingkat analisis dalam penelitian ini, bahwa yang menjadi variabel bebas atau independen adalah Peranan TNI/POLRI. Maka, variabel x (independen) adalah TNI/POLRI, dan variabel y atau variabel terikat (dependen) adalah Jaringan Terorisme Internasional di Indonesia. Sehingga penulis menggunakan analisa Korelasionis, yang berarti unit analisanya pada tingkatan yang sama.

**2. Metode Penelitian**

Dalam studi mengenai metodologi penelitian, dikenal beberapa metode penelitian seperti berikut:

a. Metode Penelitian Deskriptif

Metode ini digunakan apabila bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan peristiwa dan kejadian yang ada pada masa sekarang. Metode deskriptif merupakan metode yang berusaha mengumpulkan, menyusun, menginterpretasikan data yang kemudian diajukan dengan menganalisa data tersebut atau menganalisa fenomena tersebut.

b. Metode Penelitian Historis

Metode ini digunakan apabila peneliti bermaksud mengungkapkan peristiwa atau kejadian pada masa lalu. Keabsahan metode ini ditentukan oleh sumber datanya dan keakuratan dalam membuat interpretasi data sesuai dengan makna yang terkandung didalamnya.

c. Metode Penelitian *Ex Post Facto*

Metode ini digunakan untuk melihat dan mengkaji hubungan antara dua variabel atau lebih, dimana variabel yang dikaji telah terjadi sebelumnya melalui perlakuan orang lain. *Ex Post Facto* artinya sesudah fakta. Dalam penelitian ini, peneliti tidak perlu melakukan manipulasi atau perlakuan terhadap variabel bebas, sebab manipulasi telah terjadi oleh orang lain sebelum penelitian dilakukan.

Dari penjelasan beberapa metode diatas dan berdasarkan pokok permasalahan yang telah dikemukakan oleh penulis untuk diteliti, maka penulis akan menggunakan Metode Penelitian Deskriptif. Karena penulis akan menganalisa data terkait dengan peranan TNI/POLRI dalam menanggulangi masalah terorisme di Indonesia dengan berusaha mengumpulkan, menyusun, serta menginterpretasikan data tersebut.

**3. Teknik Pengumpulan Data**

 Teknik Pengumpulan Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teknik Studi Kepustakaan/Literatur (*library research*)

Teknik Studi Kepustakaan dilakukan melalui penelaahan data terhadap buku teks, jurnal ilmiah, dokumen, majalah berita, surat kabar, laporan lembaga pemerintah dan non-pemerintah, maupun data-data yang terdapat dalam website/internet yang terkait dengan Peranan TNI/POLRI dalam menanggulangi masalah terorisme di Indonesia.

1. Teknik Wawancara

Teknik Wawancara dilakukan untuk memperdalam masalah yang diteliti dengan melakukan perbincangan dengan para pakar atau profesional yang dianggap ahli dalam bidang TNI/POLRI serta terorisme.

**F. Lokasi dan Lamanya Penelitian**

Lembaga-lembaga yang akan dituju dalam penelitian ini adalah:

1. Sat Gultor 81 - Komando Pasukan Khusus (KOPASSUS)

Jl. RA Fadillah Raya No. 1, Cijantung, Jakarta Timur

1. Detasemen Khusus 88 (POLRI)

Rotekinfo Div. TI Polri, Jl. Trunojoyo No.3, Jakarta Selatan

**Tabel 2**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kegiatan** | **Juli** | **Ags** | **Sept** | **Okt** | **Nov** | **Des** |
| Pengajuan Penelitian di SAT-GULTOR KOPASSUS TNI AD |  |  |  |  |  |  |
| Tahap Perizinan melaksanakan Wawancara di SAT GULTOR KOPASSUS TNI AD |  |  |  |  |  |  |
| Wawancara di SAT GULTOR KOPASSUS TNI AD |  |  |  |  |  |  |
| Pengajuan Penelitian di Densus 88 Mabes POLRI |  |  |  |  |  |  |
| Wawancara di Densus 88 Mabes POLRI |  |  |  |  |  |  |

**G. Sistematika Penulisan**

**BAB I PENDAHULUAN**

Didalam Bab ini merupakan bagian awal atau pendahuluan yang terdiri atas sub-sub tema sebagai berikut: Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Pembahasan dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Hipotesis, Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data, serta Lokasi dan Lamanya Penelitian.

**BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PERAN TNI/POLRI DALAM MENANGGULANGI TERORISME DI INDONESIA**

 Dalam Bab ini, penulis akan menjelaskan tentang variabel bebas atau independen dalam penelitian ini, yakni TNI/POLRI karena sebagai variabel penjelas atau sebagai unit eksplanasi. Kemudian akan dilanjutkan dengan sub-sub judul dalam bab ini yang berisi uraian serta informasi umum mengenai tema yang dijadikan variabel bebas tersebut.

**BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG JARINGAN TERORISME INTERNASIONAL DI INDONESIA** Dalam Bab ini, penulis akan menjelaskan objek penelitian yang menjadi acuan variabel terikat atau dependen, yakni Jaringan Terorisme Internasional di Indonesia sebagai unit analisa. Kemudian akan diikuti oleh uraian sub-sub judul bab tersebut mengenai informasi umum tentang Jaringan Terorisme Internasional di Indonesia.

**BAB IV ANALISA TINDAKAN TNI/POLRI DALAM PENANGGULANGAN MASALAH TERORISME DI INDONESIA**

 Dalam Bab ini, penulis akan melakukan analisa antara kedua variabel tersebut (bebas dan terikat). Analisa dilakukan melalui verifikasi data-data (fakta dan angka) yang menjawab indikator variabel-variabel dalam tema penelitian tentang Peranan TNI/POLRI dalam Menanggulangi Jaringan Terorisme Internasional di Indonesia.

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

 Merupakan Bab terakhir dalam penelitian ini, yang berisikan tentang kesimpulan dan rekomendasi penulis dari hasil penelitian. Kesimpulan dan Rekomendasi tersebut dibuat berdasarkan dari tinjauan-tinjauan pada Latar Belakang Penelitian dalam BAB I, analisis variabel-variabel penelitian dalam BAB II dan BAB III, serta verifikasi keterkaitan variabel-variabel yang tercantum pada BAB IV.

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

1. A. Safril Mubah, “Strategi Meningkatkan Daya Tahan Budaya Lokal dalam Menghadapi Arus Globalisasi”, dalam *Jurnal Universitas Airlangga*, Vol. 24, No. 4 (2011), hlm. 302-308. [↑](#footnote-ref-2)
2. “PENANGANAN TERORISME OLEH DENSUS 88 PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HAM”, dalam [http://digilib.uin-suka.ac.id/9273/2/BAB%20I,%20V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/9273/2/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf), diakses 20 Februari 2015. [↑](#footnote-ref-3)
3. “PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA”, dalam <http://pertahanandankeamanannegara.blogspot.com/>, diakses 20 Februari 2015. [↑](#footnote-ref-4)
4. Tri Poetranto, “KONSEPSI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERORISME DI INDONESIA DALAM RANGKA MENJAGA KEUTUHAN NKRI”, dalam *Buletin Balitbang Dephan Indonesia*, Vol. 10, No. 19 (2007) [↑](#footnote-ref-5)
5. Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos (Eds.), *DARI RADIKALISME MENUJU TERORISME: Studi Relasi dan Transformasi Organisasi Islam Radikal di Jawa Tengah & D.I. Yogyakarta* (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2012), hlm. 2. [↑](#footnote-ref-6)
6. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000*, (Indonesia: MPR RI, 2002), hlm. 83-85 [↑](#footnote-ref-7)
7. Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 23. [↑](#footnote-ref-8)
8. <https://faisal94thobhone.wordpress.com/2013/09/26/pengertian-hubungan-internasional-menurut-para-ahli/>, diakses pada 19 Februari 2015 [↑](#footnote-ref-9)
9. <http://duniabaca.com/definisi-hubungan-internasional-menurut-para-ahli.html>, diakses pada 19 Februari 2015 [↑](#footnote-ref-10)
10. B. N. Marbun, *Kamus Politik* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2013) [↑](#footnote-ref-11)
11. “DINAMIKA HUBUNGAN INTERNASIONAL DAN INDONESIA”, dalam http:// pustaka.unpad.ac.id / wp-content/uploads/2010/01/ dinamika\_hubungan\_internasional\_ dan\_ indonesia.pdf., diakses 19 Februari 2015. [↑](#footnote-ref-12)
12. Hugh Miall, Oliver Ramsbotham, dan Tom Woodhouse, *RESOLUSI DAMAI KONFLIK KONTEMPORER: Menyelesaikan, Mencegah, Melola, dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002) [↑](#footnote-ref-13)
13. Budi Winarno, “Globalisasi dan Masa Depan Demokrasi”, *Jurnal Universitas Airlangga*, dalam <http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Globalisasi%20dan%20Masa%20Depan%20Demokrasi.>, diakses 18 Februari 2015. [↑](#footnote-ref-14)
14. Miriam Budiardjo, *DASAR-DASAR ILMU POLITIK* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 47. [↑](#footnote-ref-15)
15. opinihubunganinternasional.blogspot.com, diakses 2 April 2015. [↑](#footnote-ref-16)
16. “Lembar Penerangan Pasukan Kodam XII/Tanjungpura” dalam <http://www.kodam-tanjungpura.mil.id/penpas/Edisi%2011%20Nopember%202011.pdf>., diakses 19 Februari 2015. [↑](#footnote-ref-17)
17. Yahya A. Muhaimin, *Bambu Runcing & Mesiu: Masalah Kebijakan Pembinaan Pertahanan Indonesia* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), hlm. 19. [↑](#footnote-ref-18)
18. <http://www.seputarpengetahuan.com/2015/05/12-pengertian-organisasi-menurut-para-ahli-lengkap.html>, diakses pada 19 Februari 2015. [↑](#footnote-ref-19)
19. <http://www.tipepedia.com/2015/08/teori-kelembagaan-menurut-pendapat-para.html>, diakses pada 19 Februari 2015 [↑](#footnote-ref-20)
20. “Website Tentara Nasional Indonesia: Sejarah TNI” dalam <http://www.tni.mil.id/pages-10-sejarah-tni.html>, diakses 19 Februari 2015. [↑](#footnote-ref-21)
21. “Kepolisian Negara Republik Indonesia: Organisasi POLRI” dalam <http://www.polri.go.id/organisasi/op/tp/>, diakses 19 Februari 2015. [↑](#footnote-ref-22)